
**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Andi Mitsaal Sabrina Verrel^{1*}, Memen Suwandi², Suhartono³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[1mitsaalsabrina06@gmail.com](mailto:mitsaalsabrina06@gmail.com) [2memen-suwandi@uin-alauddin.ac.id](mailto:memen-suwandi@uin-alauddin.ac.id)

[3suhart2089@gmail.com](mailto:suhart2089@gmail.com)

Abstract, *This research aims to determine the effect of implementing government accounting standards, the use of information technology and human resource competence on the quality of budget realization reports with the internal control system as a moderating variable. This research is quantitative research with an associative descriptive approach. The data source was carried out by distributing questionnaires in 33 OPDs of Selayar Islands Regency with a total of 66 respondents. The results of research using multiple linear regression analysis show that partially the implementation of government accounting standards has an effect on the quality of budget realization reports, the use of information technology has no effect on the quality of budget realization reports, and human resource competence has an effect on the quality of budget realization reports. On the other hand, moderation regression analysis shows that the internal control system is unable to moderate the implementation of government accounting standards, the use of information technology, and human resource competence on the quality of budget realization reports*

Keywords: **Implementation of government accounting standards, use of information technology, human resource competency, quality of budget realization reports, internal control system**

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Sumber data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner di 33 OPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah data 66 responden. penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Disisi lain, analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Kata Kunci: **Penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan realisasi anggaran, sistem pengendalian intern.**

PENDAHULUAN

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Tata kelola sektor publik merupakan proses tata kelola yang baik di mana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik serta dalam pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia. Sumber daya untuk kemaslahatan rakyat diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Sulaiman et al., 2019). Hal yang sama dikemukakan oleh Safkaur et al., (2019) bahwa tata kelola yang baik erat kaitannya dengan reformasi di berbagai bidang seperti birokrasi, penegakan hukum, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perubahan pola pikir, budaya, sikap, dan perilaku menjadi lebih produktif, efisien, dan efektif.

Anggaran sangat penting dan relevan dalam pemerintahan daerah karena mempengaruhi kinerja pemerintah, yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Wijayanti & Atmoko, 2019) ada beberapa permasalahan yang sangat mendasar pada sistem anggaran Indonesia yang sering diangkat oleh berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, yakni: Hubungan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran tidak jelas. Anggaran tidak mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kebijakan sering kali disusun tanpa mempertimbangkan sumber daya dan alokasi yang tersedia, Buruknya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan oleh fokus pada pengendalian masukan dibandingkan pencapaian keluaran dan hasil, serta kurangnya perhatian terhadap prediktabilitas dan keberlanjutan dibandingkan pendanaan dan Kurangnya disiplin keuangan. Hal ini disebabkan total belanja negara tidak selaras dengan kapasitas pembiayaan dan pengambilan kebijakan fiskal hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi jangka pendek.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan aset-aset daerah yang potensial maupun yang riil, terutama yang bersifat finansial, baik dalam bentuk pendapatan maupun potensi pendapatan, yang bersumber dari APBN maupun APBD, dituangkan dalam suatu laporan yang disebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah atas kesesuaian penggunaan anggaran berbagai belanja dengan realisasinya. Oleh karena itu, pencapaian opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai government external auditor menjadi prioritas utama karena hal itu mencerminkan kredibilitas yang baik bagi institusi pemerintah dalam mengelola aset yang dimilikinya, terutama sumber daya finansial atau keuangannya (Rufaedah, 2018).

Dikutip dari kepulauanelayarkab.go.id bahwa terdapat hambatan atau kendala pada sistem anggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, permasalahan tersebut adalah kurangnya evaluasi terhadap sumber pendapatan daerah baru memerlukan evaluasi dan mekanisme undang-undang, perencanaan anggaran yang belum maksimal karena masih terdapat OPD yang salah menempatkan anggaran belanjanya dan proses perencanaan dan penganggaran belum dilakukan secara terintegrasi dan digital sehingga program/kegiatan masih belum sinkron antar dokumen.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan dan akuntabilitas maka diperlukan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hal yang mendasar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan SAP. Berdasarkan SAP daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan SAP. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan realisasi anggaran adalah pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen data keuangan. Laporan realisasi anggaran bisa tersaji dengan sempurna dikarenakan teknologi informasi yang mendukung akselerasi pemrosesan data transaksi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi di bidang keuangan ialah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan SAP yang bertujuan menjunjung akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui penataan dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi akan berkualitas dengan adanya peran manusia. Manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, karena manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satusatunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi (Novitasari, 2022). Lebih lanjut, (Samosir & Setiyawati, 2019) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung mereka yang memiliki kemampuan di tingkat individu, organisasi/lembaga, dan sistem untuk menjalankan fungsi atau wewenang mereka untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.

Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan, dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau jasa kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang intergal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, serta tujuan lainnya adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang mampu memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Dalam hubungan dengan pelaporan, teori dalam penelitian ini menggunakan teori stewardship. Bila dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan principal dan agen, maka dalam teori stewardship menjelaskan hubungan antara pihak principal (anggota) dan pihak *steward* (pengurus) yang cenderung memberikan manfaat maksimal pada organisasi daripada mementingkan tujuannya sendiri (Ayem & Nugroho, 2020). Teori *stewardship* adalah sebuah cara pandang baru yang harus dipimpin oleh organisasi dan anggotanya. Cara ini telah mengembangkan ideologi seperti hidup (komunikasi), kerjasama, promosi, kepercayaan, dan saling melayani. Donaldson dan Davis (1991) menegaskan bahwa tidak ada satupun manajemen yang termotivasi oleh tujuan pribadi, terutama tujuan utama yaitu kebaikan organisasi. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan antara keberhasilan organisasi dan kepuasan.

Technology Acceptance Model Theory

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model penerimaan teknologi adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi komputer. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Davis tahun 1989. Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) adalah model yang berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang baru diterapkan.

Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan pelaporan yang terstruktur dan unsur kualitatif laporan keuangan atas pelaporan situasi keuangan dan transaksi perusahaan merupakan langkah normatif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Sementara tujuan keseluruhan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, hasil anggaran, saldo kelebihan anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas, informasi ini juga membantu pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang posisi keuangan alokasi sumber daya.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu isu utama adalah penerapan standar akuntansi yang dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat menjadi SAP adalah konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan pemerintah saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Gamayuni (2018) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat pedoman yang harus diikuti dalam akuntansi keuangan pemerintah pusat dan daerah. SAP akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang ditawarkan dalam laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan umum guna meningkatkan daya banding laporan keuangan, termasuk anggaran, antar periode, dan antar lembaga.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kewajiban dalam menggunakan teknologi informasi telah diatur oleh Pemerintah dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 terkait dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya teknologi informasi ini sangat diharapkan dapat mendukung proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Teknologi informasi mencakup setiap metode atau alat terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses data, dan mengirimkan atau menyajikan dalam bentuk elektronik sebagai informasi dalam berbagai format untuk kepentingan pengguna.

Menurut Mariana (2019) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan saat menggunakan komputer dan perangkat lunak/ *software* untuk menyelesaikan tugas berdasarkan kemampuan untuk memanfaatkan aplikasi yang digunakan. Pemanfaatan teknologi dapat diukur dengan dimensi seperti perangkat, pengelolaan data keuangan, dan perawatan teknologi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketenagakerjaan Negara No.46A Tahun 2003 yang telah direvisi menjadi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2011 Kompetensi adalah bakat dan sifat yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang penting dalam menjalankan jabatannya, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang paling penting. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola seefektif mungkin agar dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan (Ramasoyan et al., 2021). Menurut Arza et al (2021) SDM merupakan faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi, lembaga dan perusahaan. Pada hakikatnya Sumber Daya manusia adalah individu yang produktif yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau institusi sebagai penggerak, pemikir dan perencana dan memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dikelola, dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Pedoman pembuatan dan penyajian laporan keuangan dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar ini merupakan suatu keharusan yang harus menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia (PP No. 71 Tahun 2010).

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Philadhelphia et al., (2020) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H¹: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Pemanfaatan teknologi informasi membantu memperlancar metode pengerjaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan serta mencegah kesalahan dalam menempatkan dokumen, jurnal dan buku besar ke dalam laporan keuangan, sehingga menjamin laporan keuangan tidak kehilangan nilainya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siallagan (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi secara positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H²: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Kemampuan seorang individu atau perseorangan dalam suatu organisasi dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi kinerjanya dalam mencapai tujuan serta menghasilkan hasil dan outcome. Semakin baik kemampuan staf pengelola keuangan maka semakin baik pula output atau hasil berupa laporan keuangan yang dibuat (Ramadhani et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan Putu Eka (2020) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

H³: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Menurut Krismiaji (2010:218) Pengendalian Intern (Internal Control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pilander et al., 2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat diasumsikan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H⁴: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dimoderasi sistem pengendalian internal

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern

Penggunaan teknologi informasi yang efektif meningkatkan sistem pengendalian internal yang kuat. Karena pengendalian internal dan teknologi saling terkait, pengendalian internal berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan terus menggunakan teknologi untuk menyediakan informasi tentang aktivitas organisasi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pebriani (2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

H⁵: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dimoderasi sistem pengendalian internal

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap hubungan kompetensi SDM dalam penyusunan laporan mutu merupakan salah satu komponen pengendalian internal. Artinya, merupakan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan evaluasi terus menerus terhadap kualitas kinerja atau kinerja pengendalian internal (Arista, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Aries M. P & Suhartono (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu mempengaruhi variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

H⁶: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dimoderasi sistem pengendalian internal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai teknik penelitian untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data, dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kep. Selayar sebanyak 33 OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kualifikasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kep. Selayar yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kecamatan wilayah daratan.
2. Pegawai yang melaksanakan proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban laporan realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
3. Kepala Sub Bagian dan Penata Laporan Keuangan pada masing-masing OPD.

Berdasarkan kualifikasi responden yang telah diuraikan sebelumnya, berikut merupakan total sampel secara keseluruhan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

$$\text{Jumlah Sampel} = \text{Jumlah OPD} \times \text{Jumlah Responden per OPD}$$

$$\text{Jumlah Sampel} = 33 \times 2 = 66 \text{ responden}$$

Jenis dan Sumber Data

Data subjek adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tidak melalui perantara, baik dari individu atau perseorangan melalui hasil pengisian kuisioner pada setiap OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai tindakan setelah pengumpulan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data sesuai variabel dan jenis responden, mentabulasi data menurut variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan komputasi untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan komputasi untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden penelitian. Data ini mencakup usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian apakah suatu model layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Multikolinearitas

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda, yaitu menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test):

- 1) Uji Koefisien Determinasi (R²)
- 2) Uji F (Uji Simultan)
- 3) Uji T (Uji Parsial)

b. Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis* – MRA)

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya variabel moderasi, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu analisis sub-groups (sub kelompok) dan *moderated regression analysis* (MRA)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memaparkan pembahasan yang meliputi; statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 21 untuk menyajikan secara garis besar mengenai data penelitian secara keseluruhan kepada pembaca. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan data deskriptif dari 66 responden penelitian

Tabel 1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Penerapan SAP	50	66	19,00	45,00	39,7727
Pemanfaatan TI	50	66	24,00	45,00	37,8788
Kompetensi SDM	50	66	22,00	40,00	32,9394
Kualitas LRA	50	66	26,00	40,00	34,0758
Sistem Pengendalian Internal	50	66	22,00	40,00	32,6818
Valid N (listwise)					

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji statistik deskriptif penerapan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata (rata-rata) sebesar 39,77, dan standar deviasi sebesar 4,398. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 45, nilai mean (rata-rata) sebesar 37,87 dengan standar deviasi sebesar 4,104. Variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 40, nilai mean (rata-rata) sebesar 32,93 dengan standar deviasi sebesar 3,995. Selain itu, statistik deskriptif kualitas laporan realisasi anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 34,07, dan standar deviasi sebesar 3,250. Sedangkan statistik deskriptif sistem pengendalian intern menunjukkan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata (ratarata) sebesar 32,68, dan standar deviasi sebesar 4,243.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji single sample Kolmogorov-Smirnov dan grafik p-plot dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.13 yang menunjukkan skor asymp. sig (2-tailed) lebih besar dari probabilitas 0,05 ($0,791 > 0,05$).

**Tabel 1.2 Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogoro - Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

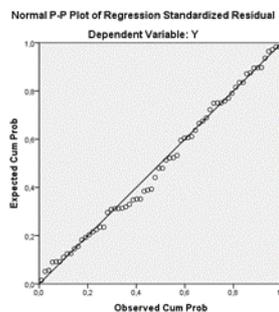
		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17746759
	Absolute	,080
Most Extreme Differences	Positive	,080
	Negative	-,044
Kolmogorov-Smirnov Z		,651
Asymp. Sig. (2-tailed)		,791

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji grafik p-plot berikut juga menunjukkan sebaran titik-titik sepanjang sumbu 0 secara teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

Gambar 1.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot



2. Uji Multikolinearitas

Tabel 1.3 Hasil Uji Multikolinearitas

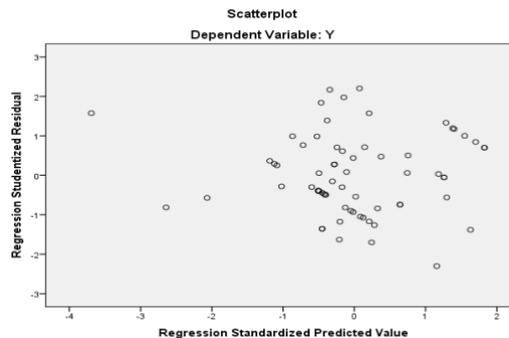
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan SAP	,535	1,869
	Pemanfaatan TI	,429	2,331
	Kompetensi SDM	,492	2,033
	Sistem Pengendalian Internal	,638	1,568

a. Dependent Variable: Kualitas LRA

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.14 diatas, menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diujikan merupakan variabel yang bebas dari gejala multikolinearitas dikarenakan nilai VIF kurang dari 10 (<10) dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 1.2 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Plot (Scatterplot)



Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diperhatikan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titiknya tersebar. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Tabel 1.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted-R Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,699 ^a	,489	,464	,29740

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Penerapan SAP (X1), Pemanfaatan TI (X2)

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Pada sajian tabel tersebut, diketahui bahwa skor Adj R² (*R Square*) adalah 0,464, yang dapat disimpulkan bahwa tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini (penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia) dapat memengaruhi kualitas laporan

realisasi anggaran sebesar 0,464 atau sekitar 46,4%, sedangkan sisanya sebesar 53,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 1.5 Hasil Uji f – Uji Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,245	3	1,748	19,767	,000 ^b
Residual	5,484	62	,088		
Total	10,728	65			

a. Dependent Variable: Kualitas LRA (Y)

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Penerapan SAP (X1), Pemanfaatan TI (X2)

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Pada tabel yang tersaji di atas, hasil uji F hitung dari hasil uji regresi berganda sebesar 19,767 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 diketahui lebih kecil dari 0,05 (0,0002.751). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemampuan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Tabel 1.6 Hasil Uji t – Uji Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,408	,382		3,682	,000
Penerapan SAP (X1)	,212	,102	,255	2,073	,042
Pemanfaatan TI (X2)	,123	,120	,139	1,028	,308
Kompetensi SDM (X3)	,339	,097	,417	3,504	,001

a. Dependent Variable: Kualitas LRA (Y)

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Persamaan dari analisis berganda dari hasil olahan tabel *coefficient* SPSS 21 diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 1,408 + 0,212X1 + 0,123X2 + 0,339X3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta bernilai 1,408. Hal ini berarti bahwa variabel independen diasumsikan sama dengan nol, maka kualitas laporan realisasi anggaran bernilai 1,408.
- Koefisien regresi variabel (X1) penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,212 yang artinya jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar 1 point maka kualitas laporan realisasi anggaran semakin baik. sebesar 0,212.
- Koefisien regresi variabel (X2) pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,123 yang artinya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami peningkatan sebesar 1 point maka kualitas laporan realisasi anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,123.
- Koefisien regresi variabel (X3) kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,339 yang artinya jika variabel kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan sebesar 1 point maka kualitas laporan realisasi anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,339.

2. Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Interaksi atau *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Tabel 1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted-R Square*) Setelah Moderasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,574	,523	,28069

a. Predictors: (Constant), KSDM_SPI, Penerapan SAP (X1), Pemanfaatan TI (X2), Kompetensi SDM (X3), Sistem Pengendalian Internal (M), PSAP_SPI, PTI_SPI

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, nilai Adjusted-R Square setelah moderasi sebesar 0,523. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi mampu memengaruhi kualitas laporan realisasi anggaran sebesar 52,3%. Sedangkan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 1.8 Hasil Uji f – Uji Simultan Setelah Moderasi ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,159	7	,880	11,167	,000 ^b
	Residual	4,570	58	,079		
	Total	10,728	65			

a. Dependent Variable: Kualitas LRA (Y)

b. Predictors: (Constant), KSDM_SPI, Penerapan SAP (X1), Pemanfaatan TI (X2), Kompetensi SDM (X3), Sistem Pengendalian Internal (M), PSAP_SPI, PTI_SPI

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Berdasarkan tabel 4.20 tersebut, diketahui bahwa hasil uji f (uji simultan) setelah moderasi menunjukkan skor f hitung senilai 11,167 > f tabel (2,172) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi secara simultan atau serentak dapat memengaruhi kualitas laporan realisasi anggaran.

Tabel 1.9 Hasil Uji t – Uji Parsial Setelah Moderasi

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,110	2,397		1,714	,092
Penerapan SAP (X1)	,811	,742	,977	1,093	,279
Pemanfaatan TI (X2)	-,465	1,116	-,522	-,417	,679
Kompetensi SDM (X3)	-,586	,780	-,720	-,751	,455
Sistem Pengendalian Internal (M)	-,514	,636	-,671	-,809	,422
PSAP_SPI	-,137	,189	-1,168	-,724	,472
PTI_SPI	,134	,279	1,163	,480	,633
KSDM_SPI	,188	,183	1,764	1,028	,308

a. Dependent Variable: Kualitas LRA (Y)

Sumber: Output SPSS 21 (2023)

Persamaan dari analisis regresi moderasi dari hasil olahan tabel coefficient SPSS 21 diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 4,110 + 0,811X1 + -0,465X2 + -0,586X3 + -0,137X1*M + 0,134X2*M + 0,188X3*M$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta bernilai 4,110. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen diasumsikan sama dengan nol serta adanya penambahan variabel moderasi, maka kualitas laporan realisasi anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 4,110.
- b) Koefisien regresi variabel (X1) penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,811 yang artinya jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar 1 poin maka kualitas laporan realisasi anggaran meningkat sebesar 0,811.
- c) Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebesar -0,465 yang artinya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 1 poin maka kualitas laporan realisasi anggaran meningkat sebesar -0,465.
- d) Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) sebesar -0,586 yang artinya ketika variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar 1 poin maka kualitas laporan realisasi anggaran meningkat sebesar -0,586.
- e) Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan yang disesuaikan dengan sistem pengendalian intern adalah sebesar -0,137 yang artinya ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan yang disesuaikan dengan sistem pengendalian intern meningkat sebesar 1 poin maka kualitas anggaran pemerintahan akan meningkat sebesar 1 poin. laporan realisasi anggaran meningkat sebesar -0,137.
- f) Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi yang disesuaikan dengan sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,134 yang artinya jika pemanfaatan teknologi informasi yang disesuaikan dengan sistem pengendalian internal meningkat sebesar 1 poin maka kualitas anggaran meningkat sebesar 0,134.

Pembahasan

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki t_{hitung} sebesar 2,073 > t_{tabel} sebesar 1,998 dan tingkat signifikansi sebesar <0,042 yang lebih kecil dari nilai 0,05 maka H_1 **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran, karena standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar yang bertindak sebagai *steward* akan mengarahkan seluruh kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tanggungjawabnya, sehingga pemerintah daerah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan standar yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP). Adapun teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dicetuskan oleh Davis (1989) bahwa dalam penggunaan teknologi sistem informasi akan mampu meningkatkan kinerja individu atau organisasi, dan penggunaannya akan mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka teori ini dapat dipakai sebagai acuan bagi pengguna, dalam hal ini pemerintah agar lebih cepat melaksanakan standar akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al (2021) yang menunjukkan pengaruh secara positif signifikan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2020) dan Yusriani & Fajri (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki t_{hitung} sebesar 1,028 < t_{tabel} 1,998 dan nilai signifikansi sebesar 0,308 yang lebih besar dari nilai 0,05. Maka hipotesis kedua **ditolak**, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi informasi yang dimiliki OPD Kabupaten Kepulauan Selayar belum mampu meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran.

Hal ini disebabkan oleh teknologi yang belum memadai, kendala jaringan, dan tentunya tidak lepas dari SDM sebagai pengguna teknologi yang mayoritas berusia >40 sehingga mereka seringkali merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, akibatnya responden sepenuhnya belum mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses akuntansi.

Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori *Stewardship* dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Teknologi informasi yang tidak memadai menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran sehingga perlu adanya peningkatan dalam menyediakan sarana teknologi informasi agar lebih mempermudah kinerja pengelola keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) dan Satriawan & Dewi (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki t_{hitung} sebesar 3,504 > t_{tabel} sebesar 1,998 dan tingkat signifikansi sebesar <0,001 yang lebih kecil dari nilai 0,05 maka H_3 **diterima**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di setiap OPD sudah berkompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai tanggung jawabnya, sehingga

semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan realisasi anggaran yang dihasilkan.

Berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar mengikutsertakan stafnya dalam pelatihan terkait pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, karena pengalaman kerja pegawai yang cukup lama, terlihat pada Tabel 4.7 bahwa 47% pegawai telah bekerja selama 15-20 tahun, yang berarti pegawai tersebut mampu menghasilkan laporan realisasi anggaran yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar ketentuan laporan keuangan yang berlaku.

Teori *stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991) mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada pihak yang diberikan wewenang yaitu *steward*, dalam hal ini pemerintah daerah Kab. Kep.Selayar dipandang sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah. Adapun teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dicetuskan oleh Davis (1989) mengungkapkan bahwa teori ini dapat memprediksi dan menjelaskan bagaimana perilaku pengguna teknologi informasi dalam menerima dan menggunakan teknologi yang berlandaskan minat (*intention*). Hal ini berarti SDM (pengguna) Kab. Kep. Selayar yang memiliki kompetensi yang tinggi akan memiliki minat (*intention*) untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosmalita & Nadirsyah (2020) dan Nilawati *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitupula dengan penelitian dilakukan oleh Rahman & Permatasari (2021) juga menunjukkan bahwa kapabilitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai t_{hitung} sebesar $-0,724 < t_{tabel}$ 1,998 dan tingkat signifikan 0,472 yang lebih besar dari 0,05 maka H_4 **ditolak**. Hal ini berarti variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan amanat atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Oleh sebab itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan meskipun tidak dibarengi dengan sistem pengendalian internal yang baik akan tetap mampu menghasilkan laporan realisasi anggaran yang berkualitas karena pada dasarnya penerapan standar akuntansi pemerintah itu sendiri sudah cukup kuat untuk menciptakan kualitas laporan realisasi anggaran.

Pada penelitian ini pemerintah daerah sebagai *steward* belum dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal agar menghasilkan laporan realisasi anggaran yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (*principal*). Begitupula dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dimana teori yang dibuat Davis (1986) mengenai pemaparan bagaimana pemanfaatan teknologi yang baik yang akan dimanfaatkan oleh pengguna teknologi dan dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk penggunaannya. Penggunaan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dimaksud adalah pemerintah. Mengingat *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam implementasinya bisa mempermudah pekerjaannya, maka teori ini dapat dipakai sebagai acuan bagi pengguna dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan pengendalian intern sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama *et al.*, (2019) dan Kapriana & Agung (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t_{hitung} sebesar $0,480 < t_{tabel}$ 1,998 dengan tingkat signifikan

0,633 atau lebih besar dari 0,05 maka H_5 **ditolak**. Hal disebabkan oleh kurangnya pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan komputer, jaringan internet serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Ketidakmampuan sistem pengendalian internal dalam memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan realisasi anggaran, meskipun sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif dalam hal pengendalian sistem informasi. Hal ini diduga sistem pengendalian intern terhadap pemanfaatan teknologi informasi belum optimal penerapannya di OPD, dimana kurangnya pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan komputer, jaringan internet serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Padahal didalam suatu lingkungan yang dikomputerisasi harus diterapkan pengendalian-pengendalian untuk mengurangi risiko pengulangan kesalahan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat.

Penelitian ini tidak mendukung teori *stewardship* dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam teori *stewardship* seharusnya pemerintah (*steward*) memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat (*principal*). Sedangkan dalam teori TAM, pemanfaatan teknologi yang baik yang akan dimanfaatkan oleh pengguna teknologi dan dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk penggunaanya. Pengguna teknologi yang dimaksud adalah pemerintah, mengingat *Technology Acceptance Model* (TAM) implementasinya adalah dapat mempermudah pekerjaan, maka pemerintah daerah harus melaksanakan pengendalian intern terhadap teknologi informasi.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saputra dkk (2020) dan Nilawati dkk (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2019) bahwa informasi keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi informasi yang didukung dengan pengendalian intern dengan optimal begitupun sebaliknya apabila tidak dilakukan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang maksimal

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moderasi $X3_M$ mempunyai t_{hitung} sebesar $1,028 < t_{tabel}$ 1,998 dan tingkat signifikan 0,308 atau lebih besar dari 0,05 maka H_6 **ditolak**. Hal disebabkan oleh sistem pengendalian internal pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensi atau keahlian yang dimilikinya, sehingga sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen sehingga ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melakukan pelatihan serta pembinaan demi meningkatkan kompetensi pegawai dibidangnya. Namun, pada penelitian yang dilakukan di OPD Kab. Kep. Selayar menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensi atau keahlian yang dimilikinya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (*steward*) perlu berupaya semaksimal mungkin kepada masyarakat (*principal*) dengan cara meningkatkan kemampuan pegawainya. Adapun teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa pengguna suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Artinya, jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan sistem pengendalian internal dalam penyeleksian atau penempatan SDM yang didukung oleh latar belakang akuntansi, maka laporan realisasi anggaran yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama *et al.*, (2019) dan Rosa *et al.* (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Ningsih *et al* (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengharuskan adanya penugasan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sistem pengendalian internal yang tepat. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran yang merupakan variabel dependen serta variabel moderasi yakni sistem pengendalian internal.

Pengujian hipotesis pertama yaitu **H1 diterima** yang berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Pengujian hipotesis kedua yaitu **H2 ditolak** yang berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Pengujian hipotesis ketiga yaitu **H3 diterima** yang berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Pengujian hipotesis keempat yaitu **H4 ditolak** yang berarti sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Pengujian hipotesis kelima yaitu **H5 ditolak** yang berarti sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan realisasi anggaran. Pengujian hipotesis keenam yaitu **H6 ditolak** yang berarti sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

Adapun keterbatasan yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian ini, yaitu penyebaran kuesioner tidak mencakup seluruh OPD yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar karena kondisi geografis wilayah yang memerlukan waktu dan biaya transportasi. Hasil penelitian ini kemungkinan dapat memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan di lokasi atau instansi yang lain, sehingga penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan, dan untuk memaksimalkan data yang dikumpulkan, perlu diperhatikan waktu yang tepat untuk menyebarkan kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries M. P, S., & Suhartono, E. (2021). Faktor Determinan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 17(2), 73–86.
- Adhitama, P. P., Suratno, & Supriyadi, E. (2019). Analisis Determinan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EKOBISMAN*, 3(3), 212–225.
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 27–40.
- Bpk. (2010). Peraturan Bpk Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Fauziah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209.
- Gamayuni, R. R. (2018). The Effect Of Internal Audit Function Effectiveness And Implementation Of Accrual Based Government Accounting Standard On Financial Reporting Quality. *Review Of Integrative Business And Economics Research*, 7(1), 46–58.
- Hidayat, D., Sari, M., Ar, F., & Azizah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- I Gusti, & Putu Eka. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 137–147.
- Kapriana, A. P., & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Opd Dikabupaten Kuburaya). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1), 47–70.
- Nilawati, N., Naz'aina, N., & Haykal, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(2), 60.
- Ningsih, N. E., Kaukab, M. E., & Azka, M. G. M. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Wonosobo. 3, 1–18.
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyuasin Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55.
- Peraturan Pemerintah (Pp) No. 71 Tahun 2010. (2010).
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kotamobagu). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(2), 128–139.
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-Iskan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248.
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). The Effect Of Quality Financial Reporting On Good Governance. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 9(3), 277–286.
- Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 255.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Wijayanti, & Atmoko, A. D. (2019). Pengaruh Efektivitas Spip Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Wilayah Kecamatan Bruno. *Karya Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 12–21.